

Konsep Alam Semesta sebagai Manifestasi Ilahi dalam Halal Supply Chain

Widhyastuti Prawoto^{1*}, Qoriatul Arbaiyah², Aji Jumiono³

^{1*}Magister Teknologi Pangan – Universitas Djuanda, wiwiedprawoto@gmail.com

²Magister Teknologi Pangan – Universitas Djuanda, qorialimusa@gmail.com

³Magister Teknologi Pangan – Universitas Djuanda, ajjumiono@unida.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis *halal supply chain* dalam perspektif kosmologi Islam dengan menempatkan alam semesta sebagai manifestasi Ilahi sebagai landasan konseptualnya. Latar belakang penelitian ini bertolak dari kecenderungan kajian *halal supply chain* yang masih dominan berfokus pada aspek operasional, sertifikasi, dan logistik, sehingga dimensi filosofis-normatifnya belum banyak dikaji secara mendalam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan yang bersifat konseptual-analitis. Sumber data meliputi Al-Qur'an, hadis, literatur pemikiran Islam, serta berbagai publikasi ilmiah mengenai *halal supply chain*, logistik halal, tata kelola syariah, dan keberlanjutan. Data dianalisis melalui analisis isi dan analisis tematik untuk mengidentifikasi keterkaitan antara prinsip tauhid, *mīzān*, amanah, dan khalifah dengan pengelolaan rantai pasok halal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *halal supply chain* tidak dapat dipahami semata sebagai mekanisme teknis untuk menjaga kehalalan produk, tetapi sebagai sistem etis yang menuntut integritas, keadilan, transparansi, keberlanjutan, dan kemaslahatan dari hulu hingga hilir. Penelitian ini berkontribusi dalam memperluas studi *halal supply chain* dari pendekatan teknis-manajerial menuju pendekatan filosofis-normatif yang lebih selaras dengan *worldview* Islam.

Kata kunci: *halal supply chain*, *halalan tayyiban*, kosmologi Islam, manifestasi Ilahi, tata kelola halal

PENDAHULUAN

Perkembangan industri halal global telah memperluas cakupan pembahasan halal dari sekadar status hukum produk menuju pengelolaan sistem produksi, distribusi, dan logistik yang menjamin integritas halal secara menyeluruh. Dalam konteks tersebut, *halal supply chain* tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai

mekanisme teknis untuk memastikan ketiadaan kontaminasi nonhalal, tetapi juga sebagai tata kelola yang menuntut konsistensi nilai, akuntabilitas, dan keberlanjutan pada seluruh mata rantai pasok. Perkembangan ini menunjukkan bahwa diskursus halal kontemporer bergerak ke arah pendekatan yang lebih integratif, yakni menghubungkan dimensi normatif syariah dengan praktik bisnis modern, sertifikasi, transparansi, dan tanggung jawab sosial (Yakin, 2025).

Sebagian besar kajian mengenai *halal supply chain* masih berfokus pada persoalan operasional, seperti standardisasi halal, sertifikasi, logistik, dan koordinasi antarpelaku usaha. Padahal, tantangan utama dalam rantai pasok halal global tidak hanya terletak pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada bagaimana sistem tersebut dibangun di atas landasan etis yang mampu menjaga kepercayaan, integritas, dan kemaslahatan. Studi terdahulu menunjukkan bahwa heterogenitas standar halal, lemahnya koordinasi lintas negara, dan masih terbatasnya harmonisasi sertifikasi merupakan persoalan yang terus menghambat efektivitas *halal supply chain* di tingkat global (Zailani et al., 2017). Temuan ini menegaskan bahwa penguatan rantai pasok halal memerlukan basis konseptual yang lebih mendalam daripada sekadar pendekatan prosedural.

Dalam perspektif Islam, alam semesta dipahami bukan sebagai realitas yang netral dan terpisah dari nilai, melainkan sebagai tatanan yang mencerminkan kehendak Ilahi, keteraturan, keseimbangan, dan tujuan kemaslahatan. Kerangka metafisik ini relevan untuk dijadikan dasar dalam membaca *halal supply chain* sebagai bagian dari ekosistem moral yang harus dijalankan secara bertanggung jawab. Dengan demikian, pengadaan bahan baku, proses manufaktur, distribusi, hingga logistik halal semestinya tidak hanya memenuhi aspek *halal* secara legal-formal, tetapi juga mencerminkan prinsip *tayyib*, amanah, dan keadilan. Sejalan dengan itu, integrasi nilai keberlanjutan, sosial, dan tata kelola dalam logistik halal menunjukkan bahwa prinsip-prinsip etika Islam dapat dikontekstualisasikan ke dalam praktik rantai pasok modern tanpa kehilangan orientasi syariahnya (Asmadi & Saimy, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut terdapat kebutuhan akademik untuk mengembangkan pembacaan yang lebih filosofis terhadap *halal supply chain*, khususnya dengan menempatkan alam semesta sebagai manifestasi Ilahi sebagai landasan ontologis dan aksiologisnya. Pendekatan ini penting karena memungkinkan *halal supply chain* dipahami bukan hanya sebagai instrumen manajerial, tetapi sebagai sistem yang merefleksikan keteraturan kosmik, amanah manusia sebagai khalifah, dan tanggung jawab etis dalam aktivitas ekonomi.

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana konsep alam semesta sebagai manifestasi Ilahi dapat menjadi kerangka konseptual bagi penguatan *halal supply chain* yang berintegritas, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi pada perluasan studi *halal supply chain* dari ranah operasional menuju ranah filosofis-normatif yang lebih sesuai dengan worldview Islam.

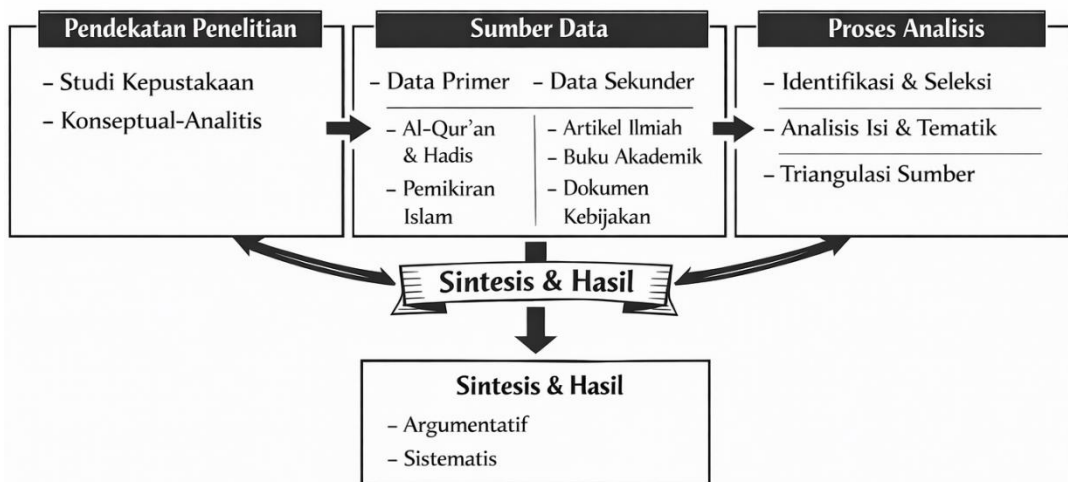
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat konseptual-analitis. Pendekatan ini digunakan karena penelitian berfokus pada penelaahan dan sintesis gagasan teoretis mengenai konsep alam semesta sebagai manifestasi Ilahi dalam kerangka *halal supply chain*, bukan pada pengukuran variabel empiris. Melalui pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk membangun pemahaman tentang hubungan antara landasan metafisik Islam, prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, dan tata kelola rantai pasok halal.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi Al-Qur'an, hadis, dan literatur pemikiran Islam yang berkaitan dengan kosmologi Islam, amanah, keseimbangan (*mīzān*), dan peran manusia sebagai khalifah. Data sekunder mencakup artikel ilmiah, buku akademik, prosiding, dan dokumen kebijakan yang membahas *halal supply chain*, logistik halal, sertifikasi halal, tata kelola syariah, dan keberlanjutan. Pemilihan sumber dilakukan secara purposif berdasarkan relevansi tema, kredibilitas publikasi, kebaruan rujukan, dan kontribusinya terhadap penguatan kerangka konseptual penelitian, termasuk rujukan

mengenai perluasan studi halal, tantangan logistik halal, dan integrasi keberlanjutan dalam rantai pasok halal.

Pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi, penelusuran, seleksi, dan pengorganisasian literatur yang relevan, dengan menggunakan kata kunci seperti *kosmologi Islam*, *manifestasi Ilahi*, *halal supply chain*, *halal logistics*, dan *maqāṣid al-sharī'ah*. Data kemudian dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*) dan analisis tematik melalui tahapan reduksi data, kategorisasi tema, dan interpretasi konseptual. Untuk menjaga ketepatan analisis, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber secara konseptual dengan membandingkan sumber-sumber keislaman dengan literatur akademik modern, sehingga hasil penelitian diharapkan mampu menghasilkan sintesis yang argumentatif, sistematis, dan relevan dengan tantangan tata kelola rantai pasok halal kontemporer.



Gambar 1. Alur metode penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

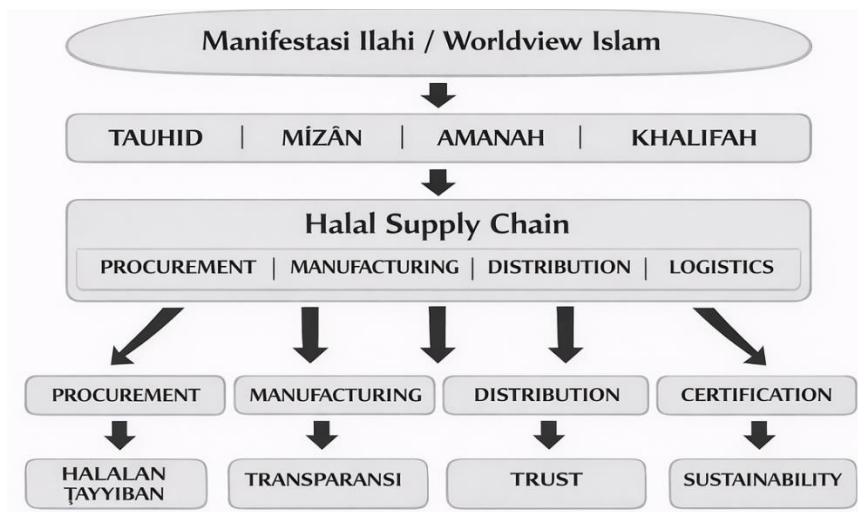
Landasan filosofis *halal supply chain* dalam perspektif kosmologi Islam menempatkan alam semesta sebagai manifestasi Ilahi yang melandasi prinsip keteraturan, keseimbangan, amanah, dan tanggung jawab manusia. Berdasarkan kerangka tersebut, pembahasan diarahkan untuk menjelaskan bagaimana nilai-nilai Ilahiah diterjemahkan ke dalam tata kelola rantai pasok halal dari hulu hingga hilir, beserta tantangan dan kontribusi teoretisnya dalam pengembangan studi *halal supply chain*.

Landasan Filosofis *Halal Supply Chain* dalam Perspektif Kosmologi Islam

Dalam perspektif Islam, *halal supply chain* tidak dapat dipahami semata-mata sebagai sistem operasional untuk menjamin kehalalan produk, melainkan sebagai bagian dari tatanan kosmik yang berakar pada prinsip tauhid. Alam semesta dipandang sebagai *ayat kauniyah*, yakni tanda-tanda kebesaran Allah yang mencerminkan keteraturan, keseimbangan, dan tujuan moral, sehingga aktivitas ekonomi manusia harus ditempatkan dalam kerangka tanggung jawab spiritual dan etis (Nasr, 1996). Pandangan ini menegaskan bahwa proses pengadaan, produksi, distribusi, dan konsumsi dalam rantai pasok halal bukanlah aktivitas yang netral nilai, tetapi praktik yang harus selaras dengan kehendak Ilahi. Dalam tradisi pemikiran Islam, konsep *tajalli* juga memperkuat pemahaman bahwa ciptaan merefleksikan sifat-sifat Ilahi tanpa menyamakan Tuhan dengan makhluk, sehingga manusia dituntut membaca realitas ekonomi secara moral dan transendental (Ibn Arabi, 1980). Dengan demikian, *halal supply chain* perlu diletakkan dalam horizon filosofis yang memandang halal sebagai bagian dari keteraturan ontologis, bukan sekadar kategori hukum produk.

Landasan filosofis tersebut berimplikasi pada perluasan makna halal dari kepatuhan formal menuju sistem nilai yang mencakup amanah, keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan. Studi *Halal Studies* menunjukkan bahwa halal mengalami perkembangan menjadi kerangka dinamis yang menjangkau sektor

logistik, transportasi, dan tata kelola ekonomi modern melalui proses “halalization,” sehingga halal tidak lagi cukup dipahami hanya pada level bahan dan proses akhir, tetapi juga pada integritas keseluruhan ekosistem rantai pasok (Yakin, 2025). Dalam konteks ini, prinsip *mīzān* memberikan dasar normatif bahwa pengelolaan rantai pasok halal harus menjaga keseimbangan antara efisiensi ekonomi, tanggung jawab sosial, dan kelestarian lingkungan. Kerangka ini sejalan dengan etika bisnis Islam yang menempatkan aktivitas ekonomi sebagai bagian dari *ibadah muamalah*, sehingga orientasi keuntungan harus tunduk pada nilai amanah, kejujuran, dan tanggung jawab sosial (Beekun, 1997). Oleh karena itu, *halal supply chain* secara filosofis harus dipahami sebagai sistem etis-ekologis yang berorientasi pada penjagaan integritas produk sekaligus penjagaan tatanan kehidupan yang lebih luas.



Gambar 2. Model filosofis halal supply chain dalam perspektif kosmologi Islam

Pada tataran konseptual, perspektif kosmologi Islam juga memperjelas bahwa keteraturan alam semesta dapat dijadikan model bagi keteraturan sistemik dalam *halal supply chain*. Setiap mata rantai, mulai dari sumber bahan baku hingga distribusi kepada konsumen, harus bekerja secara terintegrasi, transparan, dan saling bertanggung jawab agar integritas halal tidak terfragmentasi. Pemahaman ini menjadi semakin relevan karena kajian terdahulu menunjukkan bahwa pengelolaan rantai pasok halal masih sering terjebak pada aspek teknis, sertifikasi, dan logistik,

sementara landasan normatifnya belum selalu dikembangkan secara mendalam (Zailani et al., 2017). Di sisi lain, integrasi prinsip keberlanjutan, sosial, dan tata kelola dalam logistik halal memperlihatkan bahwa nilai-nilai syariah dapat diterjemahkan ke dalam praktik manajemen kontemporer tanpa kehilangan orientasi *maqāṣid al-sharī'ah* (Asmadi & Saimy, 2025). Dengan demikian, landasan filosofis *halal supply chain* dalam perspektif kosmologi Islam menegaskan bahwa sistem rantai pasok halal idealnya dibangun di atas prinsip keteraturan, *mīzān*, amanah, dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah, sehingga halal hadir bukan hanya sebagai standar kepatuhan, tetapi sebagai manifestasi etika Ilahiah dalam tata kelola ekonomi modern.

Tabel 1. Pemetaan nilai ilahiah dan implikasinya dalam *halal supply chain*

Nilai Filosofis	Makna dalam Islam	Implikasi dalam <i>halal supply chain</i>
Tauhid	Prinsip keesaan Allah yang menegaskan bahwa seluruh realitas berada dalam satu kesatuan tatanan Ilahi.	Mendorong integrasi rantai pasok halal dari hulu hingga hilir, sehingga setiap tahapan saling terhubung dan tidak dipahami secara terpisah.
Mīzān	Prinsip keseimbangan, proporsionalitas, dan harmoni dalam ciptaan.	Menjadi dasar bagi efisiensi, keadilan, keberlanjutan, dan pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab dalam rantai pasok halal.
Amanah	Tanggung jawab moral manusia untuk menjaga kepercayaan dan melaksanakan tugas sesuai ketentuan Ilahi.	Menuntut transparansi, akuntabilitas, ketertelusuran, kepatuhan syariah, dan integritas sertifikasi dalam seluruh proses rantai pasok halal.
Khalifah	Peran manusia sebagai wakil Allah di bumi yang bertugas mengelola dan memelihara kehidupan secara bertanggung jawab.	Mendorong perlindungan lingkungan, tanggung jawab sosial, kemaslahatan umum, dan tata kelola halal yang berorientasi jangka panjang.

Implementasi Nilai Ilahiah dalam Tata Kelola *Halal Supply Chain*

Implementasi nilai Ilahiah dalam tata kelola *halal supply chain* menuntut agar prinsip keteraturan, amanah, dan *mīzān* tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi diterjemahkan ke dalam mekanisme operasional yang mengatur seluruh mata rantai pasok. Dalam konteks ini, *halal supply chain* perlu dipahami sebagai sistem terintegrasi yang menjamin kehalalan produk sejak sumber bahan baku hingga sampai kepada

konsumen akhir, sehingga integritas halal dijaga melalui kesinambungan proses, bukan hanya melalui pemeriksaan pada produk akhir (Tieman, 2011). Perspektif ini sejalan dengan draft penelitian yang menegaskan bahwa keteraturan kosmos merepresentasikan sistem yang bekerja secara konsisten, terstruktur, dan saling terhubung, sehingga pengelolaan rantai pasok halal harus dibangun secara holistik dari hulu hingga hilir, bukan secara parsial. Dengan demikian, implementasi nilai Ilahiah dalam tata kelola halal menuntut adanya integrasi antara kepatuhan syariah, koordinasi antaraktor, dan pengendalian proses yang mampu menjaga kesinambungan nilai halal dalam seluruh sistem.

Tabel 2. Implementasi *Halal Supply Chain* dari Hulu ke Hilir

Tahap rantai pasok	Risiko utama	Nilai yg relevan	Bentuk pengendalian/tata kelola
Pengadaan bahan baku (procurement)	Ketidaktejelasan asal bahan, kontaminasi bahan nonhalal, pemasok tidak tersertifikasi, informasi bahan baku tidak transparan	Tauhid, amanah	Seleksi pemasok halal, verifikasi dokumen bahan, audit pemasok, <i>traceability</i> asal bahan, kontrak berbasis kepatuhan syariah
Produksi / manufaktur	Kontaminasi silang, penggunaan bahan tambahan yang meragukan, proses produksi tidak sesuai syariah, lemahnya pengawasan internal	Mizān, amanah	SOP produksi halal, segregasi fasilitas dan peralatan, pengawasan mutu, audit internal halal, pelatihan SDM, jaminan proses <i>halalan tayyiban</i>
Penyimpanan	Pencampuran produk halal dan nonhalal, penanganan tidak higienis, ketidaksesuaian suhu dan kondisi penyimpanan	Mizān, amanah	Pemisahan ruang penyimpanan, pelabelan yang jelas, pengendalian sanitasi, sistem monitoring gudang, standar penanganan produk halal
Distribusi / transportasi	Kontaminasi selama pengiriman, ketidakterlacakan produk, lemahnya koordinasi antaraktor, perbedaan standar logistik	Amanah, khalifah	Sistem logistik halal, kendaraan/kemasan terpisah, dokumentasi distribusi, <i>digital traceability</i> , koordinasi antar pihak dalam rantai pasok
Sertifikasi dan pengawasan	Sertifikasi formal tanpa integritas implementasi, ketidaksesuaian antara label dan proses aktual, lemahnya monitoring	Amanah, tauhid	Sertifikasi halal, audit berkala, pengawasan lembaga berwenang, transparansi informasi produk, penguatan <i>governance</i> syariah
Konsumsi / pasar	Menurunnya kepercayaan konsumen, mislabeling, informasi produk tidak	Khalifah, amanah	Edukasi konsumen, kejelasan label halal, komunikasi publik yang jujur, perlindungan

	memadai, orientasi pasar yang hanya simbolik		konsumen, penguatan kepercayaan berbasis integritas sistem
Keberlanjutan lintas rantai pasok	Eksplorasi sumber daya, limbah produksi, ketimpangan sosial, orientasi efisiensi tanpa etika	Mizān, khalifah	Integrasi ESG, efisiensi sumber daya, tanggung jawab sosial, perlindungan lingkungan, tata kelola berorientasi kemaslahatan

Pada tingkat tata kelola, prinsip amanah menempati posisi sentral karena menjadi dasar etis bagi transparansi, akuntabilitas, dan ketertelusuran dalam *halal supply chain*. Draft penelitian telah menegaskan bahwa amanah tidak hanya berimplikasi pada kepatuhan prosedural, tetapi juga membentuk budaya organisasi yang menempatkan tanggung jawab moral sebagai fondasi kepercayaan pemangku kepentingan. Temuan ini relevan dengan kajian yang menunjukkan bahwa integritas praktik halal sangat dipengaruhi oleh peran pemasok, manajemen puncak, dan pemerintah dalam membangun sistem kepatuhan yang kredibel dan berkelanjutan (Supian & Rashid, 2018). Dalam konteks global, tata kelola yang sesuai syariah juga perlu diperkuat melalui *digital traceability* agar informasi mengenai asal bahan, proses produksi, distribusi, dan sertifikasi dapat diverifikasi secara lebih transparan dan lintas batas negara (Hussain, 2025). Lebih lanjut, penguatan *good corporate governance* dalam rantai pasok halal lintas negara menunjukkan bahwa transparansi, kepatuhan, dan pertumbuhan berkelanjutan hanya dapat dicapai apabila tata kelola tidak dipahami secara administratif semata, tetapi sebagai pengejawantahan tanggung jawab moral dalam aktivitas ekonomi (Widi, 2025).

Nilai Ilahiah juga harus diimplementasikan dalam dimensi keberlanjutan dan kemaslahatan, sehingga tata kelola *halal supply chain* tidak hanya menjaga status halal, tetapi juga memastikan bahwa prosesnya memenuhi prinsip *halalan tayyiban*. Dalam hal ini, prinsip *mizān* menuntut keseimbangan antara efisiensi ekonomi, perlindungan lingkungan, keadilan sosial, dan kualitas produk. Draft penelitian menegaskan bahwa praktik produksi yang ramah lingkungan, efisiensi penggunaan sumber daya, distribusi yang adil, transparansi informasi, dan ketertelusuran merupakan implikasi praktis dari konsep manifestasi Ilahi dalam manajemen halal. Argumen ini diperkuat

oleh kajian mengenai integrasi prinsip ESG dalam logistik halal, yang menunjukkan bahwa dimensi lingkungan, sosial, dan tata kelola dapat dipadukan dengan prinsip maqāṣid al-sharī'ah untuk membangun rantai pasok halal yang lebih berdaya saing sekaligus beretika (Asmadi & Saimy, 2025). Dengan demikian, implementasi nilai Ilahiah dalam tata kelola *halal supply chain* mengarah pada model pengelolaan yang menempatkan sertifikasi, *traceability*, transparansi, dan keberlanjutan sebagai satu kesatuan sistem nilai, sehingga halal tidak direduksi menjadi label formal, tetapi diwujudkan sebagai praktik tata kelola yang berintegritas dan berorientasi pada kemaslahatan.

Tantangan dan Implikasi Pengembangan *Halal Supply Chain*

Pengembangan *halal supply chain* pada konteks global menghadapi berbagai tantangan struktural yang menunjukkan bahwa integritas halal tidak cukup dijaga hanya melalui sertifikasi formal. Salah satu persoalan utama adalah heterogenitas standar halal antarnegara, perbedaan mekanisme sertifikasi, serta lemahnya harmonisasi regulasi yang menyebabkan ketidakpastian dalam perdagangan dan distribusi produk halal lintas batas (Zailani et al., 2017). Tantangan tersebut diperkuat oleh temuan bahwa ekosistem pangan halal global masih menghadapi persoalan koordinasi antarpelaku, infrastruktur logistik yang belum sepenuhnya mendukung segregasi halal, serta tingginya biaya kepatuhan yang dapat membebani pelaku usaha, khususnya pada sektor yang sedang berkembang (Randeree, 2019). Dalam konteks implementasi yang lebih spesifik, berbagai kajian juga menunjukkan bahwa masalah komunikasi antar pemangku kepentingan, keraguan terhadap asal bahan baku, dan ketidakseragaman standar sertifikasi masih menjadi hambatan utama dalam menjaga kesinambungan integritas halal sepanjang rantai pasok (Islam et al., 2023). Dengan demikian, tantangan *halal supply chain* tidak hanya bersifat teknis-operasional, tetapi juga menyangkut tata kelola, legitimasi kelembagaan, dan konsistensi nilai yang mendasarinya.

Di samping tantangan regulatif dan kelembagaan, pengembangan *halal supply chain* juga menghadapi tuntutan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi, kebutuhan transparansi, dan ekspektasi konsumen yang semakin tinggi. Draft penelitian menegaskan bahwa kepercayaan publik terhadap sistem halal sangat bergantung pada kemampuan seluruh aktor untuk menjaga amanah, transparansi, dan keterlacakan proses secara menyeluruh, sehingga nilai Ilahiah yang menjadi dasar filosofis halal dapat hadir dalam praktik kelembagaan dan bisnis secara nyata. Dalam hal ini, penguatan *digital traceability* menjadi salah satu strategi penting karena teknologi pelacakan memungkinkan verifikasi yang lebih akurat atas asal bahan, proses produksi, distribusi, dan kepatuhan syariah lintas mata rantai (Hussain, 2025). Kebutuhan ini juga sejalan dengan dorongan menuju inovasi berkelanjutan, transparansi, dan kepatuhan regulatif sebagai fondasi penguatan praktik *halal supply chain* modern (Yusof, 2026). Selain itu, integritas sistem halal juga sangat bergantung pada kompetensi sumber daya manusia dan kapasitas organisasi, karena efektivitas rantai pasok halal ditentukan oleh kemampuan pelaku untuk mengelola aspek *assurance*, teknis-operasional, pasar, dan dimensi sosial-budaya secara bersamaan (Voak et al., 2023). Oleh sebab itu, pengembangan *halal supply chain* menuntut perpaduan antara pembaruan teknologi, penguatan kompetensi, dan pembentukan budaya tata kelola yang berbasis amanah.

Tabel 3. Tantangan Utama Pengembangan *Halal Supply Chain* dan Implikasinya

Tantangan	Penjelasan	Dampak	Implikasi kebijakan/solusi
Heterogenitas standar halal	Perbedaan standar, prosedur sertifikasi, dan mekanisme pengakuan halal antarnegara maupun antar lembaga menyebabkan ketidaksamaan interpretasi dan implementasi.	Menimbulkan ketidakpastian pasar, hambatan perdagangan lintas negara, dan menurunkan efisiensi koordinasi rantai pasok halal.	Harmonisasi standar halal, penguatan pengakuan timbal balik antar lembaga sertifikasi, dan penyusunan kerangka regulasi yang lebih kompatibel secara internasional.
Biaya sertifikasi halal	Proses sertifikasi sering memerlukan biaya administratif, audit, dan penyesuaian	Membatasi akses pelaku usaha kecil terhadap sertifikasi halal, memperlambat	Pemberian insentif, subsidi sertifikasi, penyederhanaan prosedur, serta

	operasional yang cukup tinggi, terutama bagi UMKM.	formalitas kepatuhan, dan mengurangi daya saing.	dukungan teknis dan pendampingan bagi UMKM.
Keterbatasan infrastruktur logistik halal	Fasilitas penyimpanan, transportasi, dan distribusi yang belum sepenuhnya mendukung segregasi halal meningkatkan risiko kontaminasi silang.	Menurunkan integritas halal produk selama distribusi dan mengurangi kepercayaan konsumen terhadap sistem halal.	Pengembangan ekosistem logistik halal, investasi infrastruktur khusus, penerapan standar penanganan halal, dan penguatan sistem monitoring.
Lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan	Hubungan antara pemasok, produsen, distributor, lembaga sertifikasi, dan regulator sering belum terintegrasi secara efektif.	Menyebabkan inkonsistensi informasi, keterlambatan pengawasan, dan lemahnya akuntabilitas di sepanjang rantai pasok.	Penguatan <i>governance</i> kolaboratif, integrasi data antar lembaga, forum koordinasi lintas aktor, dan pembagian peran yang lebih jelas.
Keterbatasan traceability	Sistem pelacakan asal bahan, proses produksi, dan distribusi belum sepenuhnya terdigitalisasi dan terdokumentasi dengan baik.	Menyulitkan verifikasi halal, meningkatkan risiko <i>mislabeled</i> , dan melemahkan transparansi kepada konsumen maupun regulator.	Adopsi teknologi <i>digital traceability</i> seperti sistem informasi terintegrasi atau blockchain, serta penguatan dokumentasi rantai pasok.
Kompetensi SDM yang belum merata	Pelaku rantai pasok halal belum seluruhnya memiliki pemahaman memadai tentang standar halal, logistik halal, <i>assurance</i> , dan tata kelola syariah.	Mengurangi kualitas implementasi halal, meningkatkan risiko kesalahan operasional, dan melemahkan daya tahan sistem rantai pasok.	Pelatihan berkelanjutan, pengembangan kompetensi halal supply chain, sertifikasi profesi, dan penguatan literasi halal pada pelaku usaha.
Transparansi dan integritas sertifikasi	Sertifikasi halal kadang dipahami hanya sebagai formalitas administratif, tanpa diikuti pengawasan dan implementasi substantif di lapangan.	Menimbulkan kesenjangan antara label halal dan praktik aktual, sehingga menggerus kepercayaan konsumen.	Penguatan audit berkala, transparansi informasi publik, akuntabilitas lembaga sertifikasi, dan integrasi sertifikasi dengan sistem pengawasan rantai pasok.
Tuntutan keberlanjutan global	<i>Halal supply chain</i> kini tidak hanya dituntut memenuhi syariah formal, tetapi juga harus menjawab isu lingkungan, sosial, dan tata kelola.	Sistem halal berisiko dipandang tidak adaptif bila tidak mengintegrasikan dimensi keberlanjutan dan tanggung jawab sosial.	Integrasi prinsip ESG, penerapan <i>halalan tayyiban</i> secara menyeluruh, efisiensi sumber daya, dan tata kelola berorientasi kemaslahatan.

Implikasi dari berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan *halal supply chain* harus diarahkan pada model yang lebih integratif, yakni menghubungkan prinsip syariah, *governance*, keberlanjutan, dan daya saing global dalam satu kerangka yang koheren. Dari sisi teoretis, penelitian ini menegaskan bahwa *halal supply chain* perlu dipahami sebagai sistem etis yang tidak hanya bertujuan menjaga status halal produk, tetapi juga merealisasikan kemaslahatan, keadilan, dan keseimbangan sebagaimana tercermin dalam prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*. Dari sisi praktis, implikasinya adalah perlunya harmonisasi regulasi halal, penguatan lembaga sertifikasi, peningkatan akses dan dukungan bagi UMKM, serta pengembangan sistem logistik yang lebih terstandar dan transparan (Awalludin et al., 2025), (Nihayati, 2025). Di samping itu, integrasi prinsip ESG dalam logistik halal juga menunjukkan bahwa keberlanjutan lingkungan, tanggung jawab sosial, dan tata kelola yang baik bukanlah agenda eksternal terhadap sistem halal, melainkan bagian dari aktualisasi nilai syariah dalam ekonomi modern (Asmadi & Saimy, 2025). Dengan demikian, implikasi utama pengembangan *halal supply chain* adalah perlunya transformasi dari pendekatan yang semata prosedural menuju pendekatan yang lebih filosofis, kolaboratif, dan berkelanjutan, sehingga rantai pasok halal mampu menjawab tuntutan pasar global sekaligus tetap setia pada nilai-nilai Ilahiah yang menjadi fondasinya.

Tabel 4. Kontribusi Teoretis Penelitian

Aspek	Pendekatan umum dalam literatur	Kontribusi penelitian ini
Halal supply chain	Umumnya dipahami sebagai isu operasional, logistik, sertifikasi, dan pengendalian teknis untuk menjaga kehalalan produk.	Memperluas <i>halal supply chain</i> menjadi kerangka filosofis-normatif yang berakar pada kosmologi Islam, sehingga tidak hanya dipahami sebagai sistem teknis, tetapi juga sebagai sistem etis dan ontologis.
Makna halal	Cenderung didekati sebagai kepatuhan syariah formal yang berfokus pada status hukum produk dan proses.	Menempatkan halal sebagai paradigma etis-ekologis yang mencakup integritas, keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan dalam seluruh rantai pasok.

Landasan konseptual	Literatur banyak bertumpu pada manajemen rantai pasok, logistik halal, dan regulasi sertifikasi.	Menambahkan landasan kosmologi Islam dengan menempatkan alam semesta sebagai manifestasi Ilahi sebagai basis ontologis dan aksiologis <i>halal supply chain</i> .
Tauhid	Jarang digunakan secara eksplisit sebagai dasar analisis rantai pasok halal; lebih sering hadir secara implisit dalam kerangka syariah umum.	Menegaskan tauhid sebagai prinsip kesatuan dan keterhubungan yang mendasari integrasi proses halal dari hulu hingga hilir.
Mizān	Umumnya belum dikembangkan secara khusus dalam literatur <i>halal supply chain</i> ; isu keseimbangan lebih sering dibahas dalam konteks keberlanjutan modern.	Menempatkan <i>mizān</i> sebagai prinsip keseimbangan yang menghubungkan efisiensi ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan dalam tata kelola halal.
Amanah	Biasanya dibahas dalam kerangka etika bisnis Islam secara umum, belum selalu dihubungkan langsung dengan tata kelola rantai pasok halal.	Mengembangkan amanah sebagai dasar moral bagi transparansi, akuntabilitas, <i>traceability</i> , dan integritas sertifikasi dalam <i>halal supply chain</i> .
Khalifah	Lebih sering dipahami dalam diskursus etika lingkungan dan tanggung jawab manusia dalam Islam.	Mengaitkan konsep khalifah dengan tanggung jawab pelaku rantai pasok halal terhadap perlindungan lingkungan, kepercayaan publik, dan kemaslahatan sosial.
Governance	Cenderung dipahami secara administratif dan regulatif, terutama terkait sertifikasi, audit, dan kepatuhan formal.	Mereposisi <i>governance</i> sebagai implementasi amanah dan tanggung jawab Ilahiah, sehingga tata kelola halal dipahami sebagai praktik moral sekaligus kelembagaan.
Keberlanjutan	Sering dibahas sebagai agenda tambahan atau eksternal terhadap sistem halal.	Menunjukkan bahwa keberlanjutan merupakan bagian inheren dari prinsip <i>halalan tayyiban</i> , <i>mizān</i> , dan maqāsid al-sharī'ah dalam pengembangan <i>halal supply chain</i> .
Kontribusi studi	Sebagian besar penelitian terdahulu menekankan dimensi praktis dan empiris dari logistik serta sertifikasi halal.	Memberikan sintesis konseptual yang menjembatani filsafat Islam, etika bisnis, dan tata kelola rantai pasok halal, sehingga memperkaya studi <i>halal supply chain</i> pada level teoritis.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa *halal supply chain* perlu dipahami tidak hanya sebagai sistem operasional untuk menjaga kehalalan produk, tetapi sebagai tata kelola ekonomi yang berakar pada kosmologi Islam. Dengan menempatkan alam semesta

sebagai manifestasi Ilahi, penelitian ini menegaskan bahwa prinsip tauhid, *mīzān*, amanah, dan khalifah memberikan landasan ontologis, etis, dan aksiologis bagi pengembangan rantai pasok halal. Dalam kerangka tersebut, *halal supply chain* tidak lagi dipersempit pada aspek sertifikasi, logistik, dan kepatuhan formal semata, melainkan dipahami sebagai sistem yang harus menjamin integritas, keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini terletak pada perluasan studi *halal supply chain* dari pendekatan teknis-manajerial menuju pendekatan filosofis-normatif yang lebih sesuai dengan *worldview* Islam.

Secara praktis, penelitian ini mengimplikasikan pentingnya penguatan tata kelola syariah, transparansi, *traceability*, harmonisasi standar halal, serta integrasi prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan rantai pasok halal. Nilai-nilai Ilahiah yang menjadi fondasi konseptual penelitian ini perlu diterjemahkan ke dalam mekanisme kelembagaan, sertifikasi, pengawasan, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia agar sistem halal mampu menjawab tantangan global tanpa kehilangan orientasi etikanya. Namun demikian, penelitian ini masih bersifat konseptual dan berbasis studi kepustakaan, sehingga temuan yang dihasilkan memerlukan pengujian lebih lanjut melalui studi empiris pada sektor, wilayah, atau model implementasi tertentu. Oleh karena itu, penelitian mendatang perlu mengembangkan kajian yang lebih aplikatif agar konstruksi filosofis yang ditawarkan dapat diuji kontribusinya terhadap penguatan ekosistem *halal supply chain* secara nyata.

REFERENSI

- Ananda, F. S. Y. (2024) The Role of Astronomy and Islamic Philosophical Wisdom ... *Al-Hisab: Journal of Islamic Astronomy*, e-ISSN: 3046-8515 Vol.1, No.2, June 2024, pp. 90 - 100
- Al-Attas, S. M. N. (1995). *Prolegomena to the Metaphysics of Islam*. Kuala Lumpur: ISTAC.
- Al-Faruqi, I. R. (1982). *Islamization of Knowledge: General Principles and Work Plan*. Herndon: IIIT.
- Asmadi, A. S. and Saimy, I. S. (2025). Integration of ESG Principles in Halal Logistics: Advancing Sustainable Practices in the Islamic Supply Chain. *International Journal of*

Research and Innovation in Social Science, VIII(XII), 1791-1805.
<https://doi.org/10.47772/ijriss.2024.8120152>

- Beekun, R. I. (1997). *Islamic business ethics*. Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought.
- Firdaus, F., & Safitri, W. (2023). Analisis Halal Supply Chain serta pengaruhnya terhadap performance UMKM makanan di Kabupaten Bekasi. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, 9(4), 1101–1112.
- Hikmatul-Hasanah et al.(2025) Integration Halal Supply Chain, Sustainability, *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, Vol. 7 No. 3 , 2025. DOI: <https://doi.org/10.24256/kharaj.v7i3.7758>
- Hussain, M. (2025). Strengthening Global Halal Supply Chains Through Shariah-Compliant Governance and Digital Traceability: Challenges and Strategic Opportunities in a Globalized Economy. *Journal of Islamic Finance and Economic Studies*, 1(2), 89-99. <https://doi.org/10.64268/jifes.v1i2.64>
- Ibn Arabi. (1980). *Fusus al-Hikam*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi.
- Islam, M. M., Talib, M. S. A., & Muhamad, N. (2023). Challenges of Halal Standards and Halal Certification for Islamic Marketing. *Muslim Business and Economic Review*, 2(1), 105-124. <https://doi.org/10.56529/mber.v2i1.156>
- Khan, M. M., & Haleem, A. (2016). Understanding “halal” and “halal certification & accreditation system”: A brief review. *Saudi Journal of Business and Management Studies*, 1(1), 32–42.
- Nasr, S. H. (1996). *Religion and the order of nature*. New York, NY: Oxford University Press.
- Pramesti, S. D., & Amir, F. (2025) Implementasi Halal Supply Chain Management ... *Jurnal Ilmiah Edunomika*, Vol. 8 No. 1 (2024): EDUNOMIKA. DOI: <https://doi.org/10.29040/jie.v8i1.11619>
- Randeree, K. (2019). Challenges in halal food ecosystems: the case of the United Arab Emirates. *British Food Journal*, 121(5), 1154-1167. <https://doi.org/10.1108/bfj-08-2018-0515>
- Sunarta, D. A., & Apriliani, R. (2025) Halal Supply Chain Management: Balancing Efficiency, Compliance, and Sustainability, *Journal of Management and Leadership*, Vol. 8 No. 2 (2025): Volume 8 - Nomor 2 - November 2025. DOI: <https://doi.org/10.47970/jml.v8i2.851>
- Saefuddin, A. M. (1987). *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Rajawali.
- Supian, K. and Rashid, N. A. (2018). The Role of Supplier, Top Management and Government in Halal Practices Integrity of Malaysian Food Business. *International Journal of Asian Social Science*, 8(8), 549-559. <https://doi.org/10.18488/journal.1.2018.88.549.559>

- Tieman, M. (2011). The application of halal in supply chain management: In-depth interviews. *Journal of Islamic Marketing*, 2(2), 186–195. <https://doi.org/10.1108/17590831111139893>
- Voak, A., Fairman, B., & Wahyuni, H. C. (2023). Halal Supply Chain Competencies. *Journal of Resilient Economies (Issn 2653-1917)*, 3(2). <https://doi.org/10.25120/jre.3.2.2023.4021>
- Widi, Hana Luthfia and Baginda Parsaulian (2025). The Role of Good Corporate Governance in Cross-Border Halal Supply Chain Management: Ensuring Transparency, Compliance, and Sustainable Growth. *Iciefs Proceeding*, 3, 286-292. <https://doi.org/10.30983/iciefs.v3i1.894>
- Yakin, A. (2025). Halal Studies. *Islamic Studies*. <https://doi.org/10.1093/obo/9780195390155-0321>
- Yusof, M. S., Ibrahim, N. Z. M., & Othman, A. A. (2026). Advancing Halal Supply Chain Practices Through Sustainable Innovation Transparency and Regulatory Compliance. *Veredas Do Direito*, 23(4), e234736. <https://doi.org/10.18623/rvd.v23.n4.4736>
- Zailani, S., Iranmanesh, M., Aziz, A. A., & Kanapathy, K. (2017). Halal logistics opportunities and challenges. *Journal of Islamic Marketing*, 8(1), 127-139. <https://doi.org/10.1108/jima-04-2015-0028>
- Zulfakar, M. H., Jie, F., & Chan, C. (2014). Halal food supply chain integrity: From a literature review to a conceptual framework. *Supply Chain Management: An International Journal*, 19(2), 217–230. <https://doi.org/10.1108/SCM-01-2013-0025>.